BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Inovasi Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto dalam penerapan Surat Perintah Perjalanan Dinas Secara Elektronik (E-SPPD) telah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas instansi pemerintah, demikian kesimpulan yang diperoleh dari temuan penelitian.

Inovasi Penerapan E-SPPD di Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto memberikan banyak manfaat bagi efisiensi dan transparansi dalam proses pengelolaan keuangan. Penggunaan sistem elektronik dalam pengajuan dan sekretariatan SPPD (Perintah Perjalanan Dinas) dapat memangkas birokrasi, mempercepat proses persetujuan, dan memperkecil kemungkinan human error. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa inovasi penerapan E-SPPD di Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto berhasil meningkatkan efisiensi dan ketepatan dalam penyusunan SPPD. Proses pengajuan SPPD lebih cepat dan efisien, serta memungkinkan pemantauan secara real time terhadap anggaran yang digunakan untuk perjalanan dinas. Inovasi Implementasi e-SPPD juga memberikan manfaat transparansi yang signifikan. Sistem elektronik memungkinkan pemangku kepentingan untuk dengan mudah melacak dan memeriksa pengeluaran anggaran perjalanan dinas. Hal ini membantu mengurangi risiko penyalahgunaan dana publik dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Meskipun manfaat inovasi penerapan E-SPPD sudah jelas, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Tantangan utama adalah mengenai aspek teknis, seperti ketersediaan infrastruktur dan kemampuan pengguna untuk menggunakan sistem. Selain itu, perubahan budaya organisasi juga menjadi faktor penting dalam mengadopsi dan menerapkan teknologi baru. Rekomendasi penelitian ini adalah pentingnya meningkatkan komunikasi dan pelatihan kepada semua pihak yang terlibat dalam inovasi implementasi E-

SPPD. Selain itu, implementasi dan penggunaan sistem juga perlu dipantau secara terus-menerus untuk memastikan kesinambungan dan perbaikan terus-menerus. Secara keseluruhan, pelaksanaan E-SPPD di Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto memberikan manfaat yang signifikan dalam penyusunan SPPD terutama dalam hal efisiensi, transparansi dan akurasi. Dengan pemahaman yang baik tentang tantangan yang ada dan upaya untuk mengatasinya, penerapan teknologi ini dapat menjadi alat yang efektif dalam mengelola keuangan pemerintah daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, ada saran dari peneliti terhadap Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto:

1. Analisis Kesiapan Teknis dan Infrastruktur: Menganalisis kesiapan infrastruktur dan teknis Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto dalam penerapan inovasi E-SPPD dengan melakukan kajian tambahan. Menentukan dan menilai kemampuan perangkat keras dan perangkat lunak serta kebutuhan tambahan yang diperlukan untuk mendukung inovasi penerapan E-SPPD.
2. Identifikasi Kendala dan Tantangan: Mencermati kendala dan tantangan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto dalam implementasi E-SPPD. Melalui wawancara, survei atau studi kasus, identifikasi masalah yang dihadapi karyawan dan pemangku kepentingan terkait dalam mengadopsi dan menggunakan sistem baru ini. Identifikasi faktor penghambat yang mungkin termasuk kurangnya pengetahuan, penolakan terhadap perubahan, atau masalah infrastruktur.
3. Analisis Efektivitas dan Efisiensi E-SPPD: Evaluasi secara menyeluruh terhadap efektivitas dan efisiensi E-SPPD di Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto. Bandingkan data dan kinerja sebelum dan sesudah implementasi E-SPPD untuk mengukur dampaknya terhadap proses pengajuan dan persetujuan SPPD, pengelolaan anggaran, dan kepatuhan terhadap peraturan keuangan.
4. Meningkatkan Komunikasi dan Pelatihan: Menyarankan kepada

Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan komunikasi dan pelatihan kepada pegawai terkait implementasi E-SPPD. Mensosialisasikan manfaat dan tujuan E-SPPD, memberikan pelatihan yang memadai untuk menggunakan sistem dengan baik, dan memfasilitasi forum untuk berbagi pengalaman dan penyelesaian masalah terkait penggunaan sistem.

5. Mengevaluasi Keamanan dan Perlindungan Data: Menjamin keamanan dan perlindungan data sangat penting dalam implementasi E-SPPD. Mengusulkan untuk mengevaluasi dan meningkatkan keamanan sistem E-SPPD, termasuk perlindungan data pribadi, informasi keuangan, dan kerahasiaan perjalanan dinas. Pastikan bahwa sistem memenuhi standar keamanan yang diperlukan dan ada kebijakan yang jelas terkait penggunaan data.
6. Mendorong Kolaborasi Antar Pemerintah Daerah: Mengusulkan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah lain yang telah berhasil menerapkan E-SPPD. Dengan berbagi pengalaman dan praktik terbaik, kami dapat mempercepat proses pembelajaran dan adopsi teknologi ini.
7. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala: Meminta Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto untuk melakukan pemantauan dan penilaian secara rutin terhadap pelaksanaan E-SPPD. Periksa keberlanjutan dan kemajuan implementasi, catat setiap perubahan yang mungkin diperlukan, dan dorong pengembangan sistem sepanjang waktu untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan yang terus berubah.